

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



## MANAJEMEN KRISIS KEPERCAYAAN PUBLIK PARTAI POLITIK

Nova Yohana

Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km, 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru

e-mail: yohana\_nova@yahoo.com

### ABSTRAK

Situasi ketidakpercayaan publik terhadap partai politik menjelang Pemilu 2014 di Indonesia saat ini tidak bisa dibiarkan secara terus menerus. Bagi publik, partai politik tidak bermanfaat positif untuk perbaikan kehidupan bangsa dan negara, justru merusak tatanan hukum dan demokrasi serta menciptakan kondisi politik yang tidak beraturan. Krisis kepercayaan ini dilatarbelakangi adanya kinerja buruk partai politik yang ditunjukkan melalui banyaknya kader partai politik terlibat kasus korupsi, kader partai tidak berpihak kepada rakyat dan melakukan tindakan amoral. Partai politik yang mengabaikan peran dan fungsinya sebagai pejuang aspirasi rakyat, mengabaikan demokrasi, dan membudayakan politik uang secara langsung menjadikan bangsa dan negara semakin terpuruk. Untuk mengatasi krisis ini Partai Politik sudah selayaknya melakukan manajemen krisis dan mengambil langkah-langkah strategis untuk mengembalikan kepercayaan publik dan elektabilitas partai pada Pemilu 2014 dengan mengoptimalkan fungsi kerakyatannya, berupaya memperbaiki kaderisasi dan penataan sumber keuangan, serta mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat tanpa dibatasi waktu dan ruang elitis.

**Kata kunci:** manajemen krisis, kepercayaan publik, partai politik, pemilu 2014

### Pendahuluan

Sudah menjadi rahasia umum krisis kepercayaan dalam masyarakat pada elit politik, partai politik serta lembaga-lembaga politik terus meluas dan semakin meningkat. Terbukti dengan adanya hasil Riset Cirrus Survivors Group yang menyatakan bahwa "40 % masyarakat

Indonesia mengaku tidak percaya terhadap integritas partai politik".<sup>1</sup> Tentu hal ini tidak bisa dibiarkan terus menerus. Mengingat Pemilu 2014 akan segera dilakukan, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Krisis kepercayaan ini akan berdampak pada partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2014 nanti. Semakin tinggi krisis kepercayaan terhadap partai politik, maka akan semakin banyak pula masyarakat yang memilih untuk golput.

Menurut data yang dilansir Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah warga yang tidak menggunakan hak pilihnya terus meningkat. Peningkatan terjadi pada level nasional maupun daerah, jumlah mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya (yang lazim disebut golongan putih atau golput) pada Pemilu Legislatif 1999 hanya 6,3%. Jumlah ini naik pada Pemilu 2004 menjadi 16% dan meningkat hampir dua kali lipat pada Pemilu 2009 menjadi 29,1%. Kecenderungan ini amat mengkhawatirkan. Dalam sepuluh tahun golput tumbuh sebesar 29%. Di beberapa daerah jumlah golput bahkan mengalahkan jumlah raihan suara pemenang pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Pada Pilgub Jabar 2013 angka golput mencapai 36,15%, sedangkan pemenang hanya meraih 33% suara. Demikian pula di Sumatera Utara, pasangan calon yang dinyatakan sebagai pemenang hanya meraih 32% suara, sedangkan angka golput mencapai 40%.<sup>2</sup>

Krisis kepercayaan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Krisis kepercayaan berkembang karena adanya bukti-bukti buruknya kinerja partai politik. Terlihat dari berbagai realitas sosial politik yang ada. Mulai dari kasus korupsi yang melanda kader partai politik, ketidakberpihakan partai politik terhadap masyarakat sampai tindakan amoral yang dilakukan oleh kader parpol seperti skandal suap yang melibatkan seks di dalamnya. Idealisme partai politik berkurang, karena parpol sekarang tidak lagi menerapkan nilai-nilai demokrasi. Demokrasi yang dilaksanakan oleh partai politik cenderung liberal. Partai politik lebih mengedepankan kepentingan pribadi kader partai dari-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.  
Dilarang memilik dan memperjual belikan sebagai barang atau jasa.  
2. Suryadi Karim, 2014. *Pemilu 2014 dan Apatis Pemilih*, hlm 592. Dalam Prosidings Seminar Besar Nasional Komunikasi, 24-25 Nopember 2014. ISKI Pusat. Jakarta



pada kepentingan rakyat. Sehingga nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, partisipatif, pemerataan dan taat hukum tidak diaplikasikan dengan baik oleh partai politik. Sehingga tidak heran jika sekarang, banyak kader partai yang melakukan korupsi untuk memperkaya diri sendiri, mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan bagaimana keadaan masyarakat di Indonesia. Selain itu, partisipasi partai politik terhadap kehidupan sosial masyarakat lagi-lagi akan terlihat apabila waktu untuk melakukan pemilu sudah dekat.

Tahun 2014 adalah tahun politik, dimana persaingan ketat antar elit politik akan terjadi untuk pemenangan pemilu 2014. Tidak hanya antara partai yang berbeda bahkan dalam satu partai. Oleh karena itu, kecenderungan untuk mengesampingkan nilai-nilai demokrasi juga akan semakin besar. Berbagai cara akan dilakukan oleh kader politik untuk mendapatkan kursi kemenangan. Saat ini dapat kita lihat bagaimana partai politik mulai melancarkan serangan untuk berkampanye demi mendapatkan citra yang positif. Sebagaimana iklan-iklan dari partai politik yang dapat kita lihat di media massa, misalnya media elektronik seperti televisi. Iklan partai politik dalam satu media saja bisa tayang sampai berkali-kali. Hal ini semakin memperlihatkan betapa finansial sangat mempengaruhi kemenangan dari partai politik.

Politik uang (money politic) bukanlah menjadi hal yang asing lagi. Akankah pemegang kekuasaan hanya berasal dari orang-orang yang memiliki kekayaan yang besar, yang dapat mempergunakan uangnya untuk memperlancar kepentingan yang ia inginkan. Sebagai contoh, kasus mantan Gubernur Banten Ratu Atut yang terbukti melakukan korupsi dalam pilkada Lebak Banten. Belum lagi kasus-kasus mengenai dinasti politik yang sekarang mulai berkembang. Permasalahan dinasti politik ini adalah permasalahan dimana dalam praktiknya, partai politik dikelola secara kekeluargaan, struktur dan kepengurusannya juga didominasi oleh satu keluarga. Kader-kader terbaik bangsa tidak diberikan kesempatan untuk mengatur dan mengelola partai politik, sehingga melalui dinasti politik akan tercipta diskriminasi politik dalam berbangsa dan bernegara serta meningkatkan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Musim politik di tahun 2014 ini tak ubahnya seperti politik dag-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



ing sapi yang menawarkan harga kekuasaan dengan harga yang tinggi. Sehingga elit partai tidak lagi memperhatikan ideologi namun melihat kepada seberapa besar uang yang dimiliki politisi. Kader-kader politik yang seperti inilah yang nantinya akan menciptakan kader partai politik yang tidak memiliki integritas dan kapabilitas untuk menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan profesional.<sup>3</sup>

Berangkat dari kasus-kasus ini, maka dirasa perlu bagi partai politik untuk menerapkan manajemen krisis kepercayaan publik terhadap partai politik. Apalagi tahun 2014 adalah tahun politik. Dimana dalam waktu dekat ini akan segera dilaksanakan pemilihan anggota legislatif disusul dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk dapat melaksanakan manajemen krisis, partai politik memerlukan *public relations* untuk menjalankan salah satu fungsinya, yaitu sebagai fasilitator untuk mengatasi krisis. *Public relations* dirasa perlu untuk memulihkan citra partai politik terkait dengan kinerja parpol dan segala kasus hukum yang menyangkut parpol. Untuk dapat melaksanakan manajemen krisis yang baik, diperlukan langkah strategis partai politik untuk memperbaiki dan meningkatkan citra positif partai politik di mata publik dengan mengembalikan kepercayaan publik terhadap eksistensinya.

### Tinjauan Pustaka Fungsi Partai Politik

Menurut Undang-undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dimaksud dengan partai politik adalah organisasi yang bersifat permanen dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia sekurukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Tahun

Partai politik memiliki fungsi utama yaitu: 1) menyerap dan menyampaikan aspirasi dan kepentingan rakyat; 2) melakukan pendidikan politik kepada rakyat tentang hak dan kewajiban warga negara bagi nega-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.  
2. Berisikan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
3. Jainuri, 2013. *Partai Politik dan Problematika Bangsa*. <http://suar.okezone.com/read/2013/08/07/58/848182/partai-politik-dan-problematika-bangsa#sthash.HWIF7PzR.dpuf>. Diakses 29 Januari 2014



288 PUBLIC RELATIONS DAN MARKETING POLITIK

ranya; 3) melakukan rekrutmen politik atau kaderisasi kepemimpinan secara demokratis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; 4) memformulasikan dan menetapkan kebijakan umum melalui institusi legislatif dan eksekutif di semua tingkat pemerintahan; 5) melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan publik melalui para kadernya di lembaga legislatif; 6) menjadi penengah antara kepentingan atau aspirasi rakyat dengan pemerintah beserta kebijakan-kebijakannya; 7) menjadi alat pengontrol kepentingan pribadi politisi yang duduk sebagai wakil rakyat maupun pejabat politik. 4

### Pengertian Manajemen Krisis

Pada umumnya, krisis dilihat sebagai suatu situasi atau kejadian yang lebih banyak mempunyai implikasi negatif pada organisasi daripada sebaliknya. Krisis menurut Barton adalah peristiwa yang tidak terduga yang memiliki potensi untuk menimbulkan dampak negatif baik bagi perusahaan maupun publiknya. <sup>5</sup>

Rhenald Kasali mengungkapkan bahwa Manajemen Krisis adalah proses cepat yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam mengenali gejala krisis dari awal dan membangun sistem untuk mencegah terjadinya kerusakan, kerugian dan hilangnya nama baik. <sup>6</sup>

### Tahapan Krisis

Steven Fink, pakar dan konsultan krisis dari Amerika Serikat mengembangkan konsep anatomi krisis menggunakan terminologi kedokteran yang biasa dipakai untuk melihat stadium suatu krisis yang menyerang manusia. Empat tahap perkembangannya adalah sebagai berikut (Kasali, 2003: 225-230):

1. Tahap Prodromal: Krisis pada tahap ini sering dilupakan orang karena perusahaan masih bisa bergerak dengan lincah. Padahal pada tahap ini, bukan pada tahap krisis sudah kronis (meledak), krisis sudah mulai muncul. Tahap prodromal sering disebut pula *warning stage* karena ia memberi sirene tanda bahaya mengenai simtom-simtom
- 4 Budiarjo, Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama . hal 3
- 5 Barton Laurence, 1993. *Crisis in Organizations : Managing and Communicating in the Heat of Chaos*. Cincinnati : South-Western Publishing hal 2
- 6 Barton Laurence, 1993. *Crisis in Organizations : Managing and Communicating in the Heat of Chaos*. Cincinnati : South-Western Publishing hal 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



yang harus segera diatasi.

Tahap Akut: Meski bukan di sini awal mula krisis, orang menganggap suatu krisis dimulai dari sini karena gejala yang samar-samar atau sama sekali tidak jelas itu mulai kelihatan jelas. Dalam banyak hal, krisis yang akut sering disebut sebagai *the point of no return*. Artinya, sekali sinyal-sinyal yang muncul pada tahap peringatan (prodromal) tidak digubris, ia akan masuk ke tahap akut dan tidak bisa kembali lagi. Kerusakan sudah mulai bermunculan, reaksi mulai berdatangan, isu menyebar luas.

Tahap Kronik: Organisasi masih merasakan dampak dari krisis yang terjadi dan terkadang dampak ini bisa lebih lama dari krisis itu sendiri. Tahap ini disebut sebagai tahap recovery atau *self analysis*. Di dalam perusahaan, tahap ini ditandai dengan perubahan struktural.

Tahap Resolusi: Tahap ini adalah tahap penyembuhan (pulih kembali) dan tahap terakhir dari 4 tahap krisis. Meski bencana besar dianggap sudah berlalu, tetap perlu berhati-hati, karena riset dalam kasus-kasus krisis menunjukkan bahwa krisis tidak akan berhenti begitu saja pada tahap ini.<sup>7</sup>

### Upaya penanggulangan krisis

Pengelolaan krisis dapat dilakukan melalui lima langkah berikut ini (Kasali, 2002: 231) yakni : identifikasi krisis, analisis krisis, isolasi krisis, pilih strategi komunikasi untuk mengendalikan krisis, dan membuat program pengendalian

Karena yang terjadi adalah krisis public relations, maka PR harus secepatnya mungkin mengklarifikasi pemberitaan negatif yang sudah menyebar. PR tidak boleh menutup diri, karena dengan begitu pemberitaan media akan semakin intensif. Esensi manajemen krisis adaah upaya untuk menekan faktor ketidakpastian dan resiko sampai ke tingkat yang paling rendah yang diawali dengan mengumpulkan informasi yang berpotensi mengakibatkan krisis pada organisasi tersebut.

### Penyelesaian Krisis

Manajemen harus memiliki *crisis management plans* yang didefinisikan secara teliti untuk menghadapi berbagai level krisis yang mungkin terjadi. Oleh karena itu jika terjadi kondisi kritis, organisasi dapat

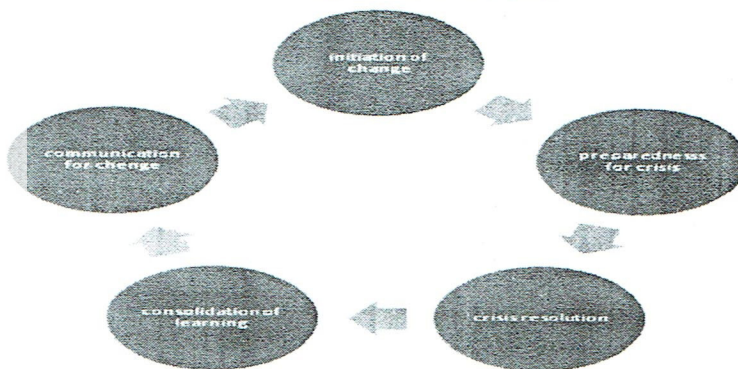
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

7. Ibid, hlm 225-230



mendefinisikan dan merespon dengan baik.<sup>8</sup>Gambar berikut menunjukkan bagaimana mengidentifikasi siklus krisis, dimulai dengan persiapan menghadapi krisis (*preparedness for crisis*), penyelesaian krisis (*crisis resolution*), mengambil pelajaran dari krisis (*consolidating of learning*), mengkomunikasikan kepada publik (*communication for changer*), dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan di masa datang (*initiation of change*).

Gambar 1 : Identifikasi Siklus Krisis



Sumber : Firsan Nova, 2009, *Crisis Public Relations*

## Metode

Dalam artikel ini digunakan metode studi *literature*, yaitu metode yang menggunakan studi pustaka dengan mengumpulkan semua bahan yang diperoleh dari buku-buku, media massa dan/atau jurnal ilmiah.

## Hasil Dan Pembahasan

### Prahara Politik Partai dan Krisis Kepercayaan

Partai politik saat ini mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat karena penampilan yang tidak memuaskan dalam dunia politik. Partai-partai terjebak dalam praktik korupsi. Bila ada satu politisi terlibat kasus korupsi, pasti akan ikut menyeret politisi lain yang bahkan lintas partai. Meningkatnya krisis kepercayaan publik terhadap partai politik tergambar dari hasil survei yang dilakukan oleh Cirus Surveyor

<sup>8</sup> Ibid, hlm 146



Group. Dikutip dari [tribunnews.com](http://tribunnews.com) Kadek Dwita Apriani selaku Direktur Riset CSG mengatakan "Tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik sangat rendah". Hasil survei dari CSG ini menunjukkan bahwa 49% responden tidak percaya dengan partai politik, 39,2 % kurang percaya, 9,4% percaya dan 11,4% lainnya tidak tahu. Survei dilakukan di 3 provinsi melalui wawancara tatap muka dengan metode acak bertingkat. Hasil survei tersebut juga menggambarkan bagaimana kinerja partai politik selama ini.<sup>9</sup>

Selain itu, elektabilitas partai politik yang saat ini terjerat kasus korupsi juga menurun drastis. Dikutip dari [nasional.kompas.com](http://nasional.kompas.com), melalui survei *Poltracking Institute* suara Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilu Legislatif 2014 diprediksi turun drastis dari Pileg 2009 lalu. Partai Demokrat dan Partai PKS, adalah sama-sama partai yang pernah menjadi partai fenomenal dalam dua kali pemilu (2004 dan 2009). Keduanya sempat mengebrak jagad perpolitikan nasional dengan tingkat elektabilitas politik yang cukup signifikan. Partai Demokrat dengan magnet SBY mampu mengatrol suara demokrat dari 7% di Pemilu 2004 melompat menjadi 21% pada pemilu 2009. Sementara PKS dengan soliditas organisasi dan kadernya, mampu meroket dari 1% di Pemilu 1999 (saat itu masih PK), melompat menjadi 7,21% pada pemilu 2004 dan 7,82% pada pemilu 2004. Banyak pengamat mengatakan, kedua partai ini sangat berpotensi menjadi partai masa depan Indonesia. Namun prakiraan politik para pengamat untuk sementara ini dibilang meleset. Ini setidaknya jika kita melihat prahara politik-hukum yang menimpa kedua partai ini, yakni sama-sama terkena bencana kasus dugaan korupsi. Keduanya sama-sama sedang dihantam krisis prahara politik yang cukup menyulitkan.<sup>10</sup>

Realitas yang menyebutkan bahwa masyarakat sudah tidak percaya seharusnya membuat partai politik berkaca dan memperbaiki diri. Hal ini menjadi sebuah masalah yang serius dan harus segera diatasi. Mengingat Pileg akan dilaksanakan kurang lebih dua bulan lagi.

Manu, Selany, 2014. 40 Persen Publik Tidak Percaya Terhadap Parpol, <http://merdekaonline.com/berita-4510-40-persen-publik-tidak-percaya-terhadap-parpol.html>. Diakses 30 Januari 2014

Shamsanuddin. 2013. " Survei: Suara Demokrat dan PKS Jeblok Karena Korupsi. <http://nasional.kompas.com/read/2013/12/19/1625403/Survei.Suara.Demokrat.dan.PKS.Jeblok.karena.Korupsi>). Diakses 30 Januari 2014



Sudah saatnya partai politik mengambil langkah tegas dan strategis untuk kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia.. Salah satu ciri kematangan politik suatu partai (modern) diukur dari bagaimana manajemen politik partai ketika menghadapi krisis atau prahara politik, baik internal maupun eksternal. Bagaimana kader dan struktur partainya menyikapi krisis dan prahara politik yang terjadi.

Salah satu langkah yang harus diambil oleh partai politik adalah membuat manajemen krisis kepercayaan publik terhadap partai politik. Salah satu bagian dari organisasi yang melaksanakan fungsi ini adalah *Public Relations* (PR). *Public Relations* adalah satu bidang ilmu komunikasi praktis, yaitu penerapan ilmu komunikasi pada suatu organisasi/ perusahaan atau organisasi dalam melakukan fungsi manajemen.<sup>11</sup> Dari definisi ini dapat dikatakan bahwa fungsi manajemen benar-benar dibutuhkan oleh partai politik.

*Public Relations* memiliki beberapa peranan dalam melaksanakan kegiatannya yakni sebagai *Exper Presciber*, *Communication Facilitator*, *Problem Solving Facilitator* dan *Technician Communication*.<sup>12</sup> Saat ini partai Politik sedang menghadapi situasi genting karena dilanda krisis kepercayaan publik. Karena itulah peran PR sebagai *Problem Solving Facilitator* sangat dibutuhkan untuk mengatasi persoalan atau krisis dengan membentuk tim manajemen krisis.

### Manajemen Krisis Kepercayaan Publik Partai Politik

Manajemen Krisis adalah pendekatan kapasitas untuk memahami, mengerahkan, mengkoordinasikan, dan menjadikan satu semua strategi dan fungsi kebijakan, serta semua keahlian hubungan dengan publik atau keahlian *public relations*, menjadi sebuah pemahaman yang efektif: berisikan partisipasi dalam membentuk kebijakan publik yang dapat berpengaruh terhadap masa depan masing-masing individu baik perusahaan atau institusional. Teori manajemen krisis didasarkan bagaimana menghadapi krisis (*crisis bargaining and negotiation*),

1. Soemirat, Soleh. Elvinaro, Ardianto. 2005. *Dasar-dasar Public Relations*. Bandung: Remaja Rosdakarya. hlm 146
- 12 Cutlip, Scott M, Allen H. Center, Glen M. Broom. 2000. *Effective Public Relations*. Jakarta: Kencana Media Group.hlm 37



membuat keputusan (*decision making*), dan memantau perkembangan krisis (*crisis dynamics*).<sup>13</sup>

Adapun jenis krisis yang tengah melanda partai politik saat ini adalah krisis Public Relations, dimana krisis ini terjadi karena adanya pemberitaan negatif yang melanda partai yang bersangkutan. Sebagai contoh, Pemberitaan negatif ini berkaitan dengan kasus-kasus korupsi yang menimpa kader partai politik. Sebut saja Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kader partai politik dari kedua parpol ini sedang tersandung kasus korupsi. Partai Demokrat dengan Kasus Hambangnya dan PKS dengan kasus Suap Impor Daging Sapi.

Krisis kepercayaan publik yang terjadi terhadap partai politik ini jika dilihat dari tahapan-tahapan krisis, telah masuk ke dalam krisis tahap *acute* (akut), dimana pada tahap ini krisis sudah terbentuk. Publik dan media pun sudah mengetahui adanya masalah yang terjadi di dalam partai politik ini. krisis kepercayaan yang masih berlangsung hingga saat ini telah membuat nama baik dan citra partai politik menjadi tercemar. Sehingga mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2014 nanti. Sudah saatnya sekarang krisis yang melanda partai politik bergerak menuju tahap *clean-up* atau pembersihan, untuk memulihkan dan kinerja partai politik. Untuk dapat melakukan pembersihan, maka partai politik harus bisa menerapkan manajemen krisis yang baik, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh partai politik dalam upaya penanggulangan krisis.

Penanggulangan Krisis. Untuk dapat menanggulangi krisis, Pengelolaan krisis dapat dilakukan melalui lima langkah berikut ini :<sup>14</sup>

1. Identifikasi Krisis. Tim manajemen krisis dari masing-masing parpol harus melakukan penelitian secepat mungkin, agar parpol tahu krisis ini sudah melanda siapa saja, dan seberapa besar pengaruhnya terhadap Pemilu 2014 mendatang.

2. Analisis Krisis. Setelah mendapatkan hasil dari survei atau penelitian yang dilakukan, tim manajemen krisis melakukan analisis terhadap hasil penelitian yang diperoleh.

3. Penanggulangan Krisis. Pada tahap ini, krisis bisa menyebarluas sehingga harus dilakukan pencegahan agar tidak semakin meluas.

13 Op.cit. Firsan, Nova . hlm 146

14 Op.cit. Khasali, Rhenald, hlm 231





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

## 5. Pilih strategi Komunikasi untuk mengendalikan Krisis

Dalam mengendalikan krisis, partai politik harus memilih strategi yang seperti apa yang akan dilakukan untuk menanggulangi krisis, apakah melalui strategi defensif, adaptif ataukah dinamis. Strategi defensif dilakukan dengan cara mengulur waktu, tidak melakukan apa pun dan membentengi diri dengan kuat. Strategi adaptif dilakukan dengan mengubah kebijakan, modifikasi operasional, kompromi dan meluruskan citra. Sedangkan strategi dinamis bersifat agak makro dan mengakibatkan berubahnya karakter perusahaan.

Sebagai contoh, salah satu strategi adaptif yang dilakukan oleh PKS secara cepat adalah mengganti presiden PKS. Yang awalnya adalah Lutfi Hasan Ishaq digantikan oleh Annis Mata karena LHI ditetapkan sebagai tersangka. Untuk kembali meluruskan citra, PKS memiliki cara tersendiri.

### Membuat program pengendalian

Program pengendalian ini adalah bentuk penerapan dari strategi yang diambil. Misalnya PKS menggunakan strategi adaptif untuk kembali meluruskan citra partainya. Anis Matta selaku presiden PKS mengatakan "Dalam mengembalikan fungsi partainya, PKS memiliki gerakan bernama "Gesit" (Gerakan Silaturahmi). Ia juga menegaskan bahwa membangun kepercayaan itulah yang paling penting. Hal ini akan oleh PKS dengan cara mengurangi komunikasi tidak langsung dan memperbanyak komunikasi langsung.

### Penyelesaian Krisis

Manajemen harus memiliki *crisis management plans* yang didesain secara teliti untuk menghadapi berbagai level krisis yang mungkin terjadi. Oleh karena itu jika terjadi kondisi kritis, organisasi dapat mendefinisikan dan merespon dengan baik. Adapun siklus krisis yang harus dilalui untuk menyelesaikan sebuah krisis adalah dimulai dengan persiapan menghadapi krisis (*preparedness for crisis*), penyelesaian (*crisis resolution*), mengambil pelajaran dari krisis (*consolidating of learning*), mengkomunikasikan kepada publik (*communication*

for changer), dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan di masa datang (*initiation of change*).<sup>15</sup>

Menurut penulis, melakukan persiapan menghadapi krisis penting untuk dilakukan oleh public relations di dalam partai politik. Agar apabila krisis kepercayaan terjadi secara tiba-tiba partai politik dapat mengambil langkah tegas dan strategis untuk menyelesaikannya. Dalam penyelesaian krisis kepercayaan partai politik, ada beberapa pedoman yang bisa membantu parpol dalam mengatasi krisis.

1. Mempersiapkan *contingency plan* (tim krisis manajemen dibentuk dalam waktu singkat).

2. Segera umumkan siapa yang menjadi official spokesperson yang berhak bicara dan memberikan keterangan tentang krisis ke masyarakat dan media yang juga merupakan bagian dari tim krisis.

Partai politik harus bergerak cepat, karena media biasanya akan memberikan informasi berdasarkan kejadian awal krisis.

Memberikan informasi yang akurat dan benar. Karena dengan begitu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai yang bersangkutan bisa meningkat.

Ada beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan oleh partai politik untuk memperbaiki citranya di mata publik terkait dengan krisis kepercayaan mereka hadapi.

Langkah strategis berikut ini bisa diterapkan pada program penanganan untuk menanggulangi krisis:

1. Tetap tenang, manfaatkan krisis untuk berbenah diri serta tingkatkan intensitas komunikasi dengan publik internal. Lakukan konsolidasi untuk tetap menjaga keutuhan dan kesolidan anggota partai politik. Strategi ini telah dilakukan oleh salah satu partai yang dilanda krisis kepercayaan publik. Partai ini adalah PKS. Di tengah krisis melanda partainya, PKS semakin kuat dan solid untuk tetap bertahan dan menyelesaikan krisis ini dengan tenang.

2. Menjalin hubungan baik dengan media. Menjadi partai politik yang

<sup>15</sup> Op.cit, Firsan, Nova, hlm 146



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

terbuka terhadap media. Diharapkan dengan keterbukaan informasi dari parpol, publik bisa mengurangi krisis kepercayaannya. Karena parpol telah berusaha memberikan informasi yang jujur dan benar. Keterbukaan informasi kepada media tidak hanya menyangkut krisis yang terjadi dengan parpol yang bersangkutan, namun juga terbuka terhadap laporan keuangan internal partai. Partai akan mempublikasikan laporan keuangan kepada publik, sehingga publik dapat melihat bahwa anggaran yang dikelola oleh partai berasal dari sumber yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Berkaitan dengan maraknya kasus korupsi yang terjadi, maka Pemilu 2014 ini sangat potensial untuk dijadikan ladang untuk menyamarkan dana kampanye. Oleh karena itu, parpol dalam hal ini juga harus memberikan informasi kepada media bahwa partai politik yang bersangkutan telah mematuhi Peraturan KPU No 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu untuk mencegah pengumpulan dan penggunaan dana kampanye melalui sumber-sumber yang tidak sah. Dengan keterbukaan informasi ini sesungguhnya parpol telah berperan dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi sehingga dapat mengurangi krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.

Memperbaiki dan meningkatkan kualitas dari fungsi partai politik yang mencakup:

### Komunikasi Politik

Membangun suatu citra politik tidak dapat dilakukan tanpa adanya komunikasi politik.<sup>16</sup> Mengkaji komunikasi politik pada hakekatnya juga mengkaji tiga macam media komunikasi politik, yaitu (1) komunikasi interpersonal atau sama juga dengan retorika, yang menekankan pada peran opinion leadership (2) media organisasi atau sama dengan propaganda, dan (3) media massa yang sama dengan periklanan. Dalam menyampaikan komunikasi politik, harus mengandung unsur persuasi politik.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Firmanzah, 2007. *Marketing Politik : Antara Pemahaman dan Realita*. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia. Hlm 255

<sup>17</sup> Suwardi, Harsono, 2002. *Politik, Demokrasi dan Manajemen Komunikasi Politik*, Galang Pers: Yogyakarta



Menyampaikan pesan yang dapat diterima maupun ditolak. Apabila diterima atau mendapat perhatian, maka individu akan mempersepsikannya. Persepsi akan positif jika pesan politik yang diberikan sesuai dengan kognisi seseorang. Dalam tataran kognisi, seseorang akan yakin terhadap stimulus apabila telah memahami rangsang tersebut. Untuk itu seseorang perlu diberikan pesan politik yang dapat mempengaruhi kognisinya. Motivasi dan sikap akan menentukan respon seseorang (votes). Proses pembentukan citra politik pada akhirnya akan menghasilkan sikap, pendapat, dan tanggapan yang berujung pada dukungan politik termasuk memberikan suara dalam pemilu.

### Sosialisasi Politik

Setika mengadakan sosialisasi politik, hendaknya partai politik meningkatkan pendekatan interpersonal terhadap masyarakat melalui kampanye blusukan, bukan hanya sekedar melakukan kampanye dialogis yang terkesan hanya mengobrol janji belaka. Dalam agenda sosialisasi politik juga partai politik harus berusaha memberikan pendidikan politik baik kepada anggota parpol tersebut maupun kepada masyarakat luas untuk membangun orientasi pemikiran untuk sadar tanggungjawabnya sebagai warga negara. Selain itu partai politikus memberikan pengetahuan kepada publik akan partisipasi dan konsensi mereka dalam Pemilu 2014 nanti.

### Perbaikan kinerja parpol

Perbaikan kinerja parpol yang satu ini bisa dilakukan dalam jangka panjang dengan tidak membudayakan politik uang dan berpegang pada Pancasila serta UUD 1945, berakhlak mulia serta mempunyai realisme dan nasionalisme terhadap Negara Republik Indonesia. Meningkatkan kualitas bukan hanya sekedar materi.

Memaksimalkan fungsi kerakyatan dengan benar-benar menjadi bagi aspirasi masyarakat untuk kemudian diusulkan menjadi kebijakan publik.

Membuat program-program yang mendekatkan partai politik dan masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah.



dan Pancasila sebagai landasan berpikir, sehingga komunikasi politik antara partai politik dan masyarakat tidak hanya berlangsung ketika Pemilu akan diselenggarakan, namun menjadi sebuah program yang kontinue.

Memberikan sanksi yang tegas pada kader partai yang terbukti melanggar nilai-nilai demokrasi, Pancasila dan UUD 1945. Serta benar-benar menjalankan tujuan Partai Politik menurut UU No 2 Tahun 1999, bahwa tujuan umum dari partai politik ini adalah untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia yang tertera dalam Pembukaan UUD 1945.

Melaksanakan evaluasi atas program yang dilaksanakan oleh parpol dan mengadakan penelitian untuk mengetahui apakah krisis kepercayaan masih melanda masyarakat atau tidak.

Tidak mengandalkan personality dalam manajemen organisasi partai.

Hal yang terakhir yang harus dilakukan oleh partai politik adalah penelitian atau riset. Hal ini penting terkait dengan seberapa efektif pengaruh program-program yang dibuat oleh partai untuk mengurangi krisis kepercayaan terhadap partai politik yang tengah melanda masyarakat saat ini. Tidak hanya ketika terjadi krisis namun ketika sebuah isu mulai muncul sebagai sebuah organisasi yang harus mempertahankan citra dan eksistensinya maka sebuah partai politik melalui *public relations* harus mengadakan penelitian di awal dan di akhir ketika isu atau krisis melanda partai politik tersebut.

### Kesimpulan

Krisis pada sebuah organisasi bisa melanda kapan saja, oleh karena itu penting bagi organisasi dalam hal ini partai politik untuk mempersiapkan diri menghadapi krisis, mengingat tahun 2014 ini merupakan tahun pemilu. Artinya perang pencitraan antara satu partai dengan partai yang lain akan berjalan ketat, ditambah lagi dengan perilaku buruk aktor partai politik yang membuat masyarakat mengalami krisis kepercayaan terhadap partai politik. Namun jika persiapan sebelum krisis tidak dilakukan, partai politik harus sesegera mungkin membentuk tim manajemen krisis untuk menanggulangi krisis yang terjadi dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

Dijarak mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



meningkatkan kembali fungsi dan tujuan politik sesuai dengan UU No 2 tahun 2011 demi mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Manajemen krisis ini juga dilakukan dengan berlandaskan pada Pancasila sebagai falsafah negara dan UUD 1945 sebagai penentu gerak dan eksistensi partai politik dengan menanamkan nilai-nilai demokrasi.

Pengelolaan manajemen krisis pada partai politik, akan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2014 nanti. Oleh karena itu, partai politik juga harus terbuka kepada masyarakat akan permasalahan yang terjadi di dalam internal partai politik yang bersangkutan. Mengutamakan keterbukaan informasi, dengan memberikan informasi yang baik dan benar. Mudah-mudahan melalui manajemen krisis ini, tingkat krisis kepercayaan publik dapat berkurang sebelum Pemilu 2014 dilaksanakan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Budiardjo, Miriam, (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Barton Laurence, 1993. *Crisis in Organizations : Managing and Communicating in the Heat of Chaos*. Cincinnati : South-Western Publishing
- Philip, Scott M, Allen H. Center, Glen M. Broom. 2000. *Effective Public Relations*. Jakarta: Kencana Media Group
- Prasman, Nova.. 2009. *Crisis Public Relations*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Prasmanzah. 2007. *Marketing Politik : Antara Pemahaman dan Realitas* . Jakarta : Penerbit Yayasan Obor Indonesia.
- Rhenaldi, Rhenaldi. 2003. *Manajemen Public Relations : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: PT. Pusaka Utama Grafiti.
- Soleh, Elvinaro, Ardianto. 2005. *Dasar-dasar Public Relations*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Hardi, Harsono, 2002. *Politik, Demokrasi dan Manajemen Komunikasi Politik*. Yogyakarta: Galang Pers
- Adi Karim, 2014. *Pemilu 2014 dan Apatis Pemilih* . Prosiding Seminar Besar Nasional Komunikasi, 24-25 Nopember 2014. Jakarta: ISKI Pusat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak diperkenankan untuk kepentingan komersial atau keuntungan pribadi.

2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dengan cara apapun.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

**Website**

- January, 2013. Partai Politik dan Problematika Bangsa. <http://suar.okezone.com/read/2013/08/07/58/848182/partai-politik-dan-problematika-bangsa#sthash.HWIF7PzR.dpuf>. Diakses 29 Januari 2014
- Ihsanuddin. 2013. Survei: Suara Demokrat dan PKS Jeblok Karena Korupsi. <http://nasional.kompas.com/read/2013/12/19/1625403/Survei.Suara.Demokrat.dan.PKS.Jeblok.karena.Korupsi>. Diakses 30 Januari 2014
- Rahmat, Sahid. 2013. "Politik Liberalistik – Partai Politik Alami Krisis Kepercayaan". <http://www.koran-sindo.com/node/348289>. Diakses 29 Januari 2014
- Selany, Ranu, 2014. 40 Persen Publik Tidak Percaya Terhadap Parpol. <http://merdekaonline.com/berita-4510-40-persen-publik-tidak-percaya-terhadap-parpol.html>. Diakses 30 Januari 2014